

HIPSI

Komisi IV DPR RI Bersama Kementerian Pertanian Gelar Bimtek Untuk Petani di Kabupaten Bungo!

Mustika Rahmawati - BUNGO.HIPSI.OR.ID

Oct 18, 2023 - 20:10



BUNGO- Kementerian Pertanian bersama Komisi IV DPR RI menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan Standar Instrumen Pertanian Komoditas Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan di desa sungai buluh kecamatan Rimbo Tengah kabupaten Bungo, Rabu (18/10).

Kegiatan yang prakarsai oleh Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) provinsi Jambi dibuka oleh Anggota DPR RI M. R. IHSAN YUNUS, BA., B,Comm., ME.Con.



Hadir juga Caleg DPD RI Petrus Hilman DT Purba fraksi PDI-PERJUANGAN serta sejumlah pejabat Kementerian Pertanian dan para kelompok tani desa sungai buluh.

Dalam sambutannya Komisi IV DPR RI Ihsan Yunus mengatakan, dengan diadakannya Bimtek ini bisa menambah pengetahuan masyarakat tentang pemilihan benih dan memperkuat penggunaan benih bersertifikat, diharapkan dapat mencapai hasil pertanian yang lebih baik, meningkatkan ketahanan pangan, dan memenuhi tuntutan pasar yang semakin ketat.

“Saya berharap Bimtek ini akan menambah ilmu pengetahuan para petani dalam memilih benih tanaman pangan berstandar untuk meningkatkan produktivitas pertanian kita,” ucap Ihsan.

Ihsan Yunus juga berharap, melalui Bimtek tersebut dapat menambah wawasan dan pemahaman petani tentang penggunaan benih bersertifikat dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

“Dengan Bimtek ini diharapkan pengetahuan para petani akan meningkat, bagaimana caranya menggunakan benih tanaman terstandar. Sehingga produktivitas hasil pertanian juga turut meningkat. Dengan demikian tidak sulit bagi kita mencapai Ketahanan Pangan,” ujar Ihsan Yunus.



Ihsan Yunus juga menambahkan bahwa provinsi Jambi ini salah satu wilayah pertanian yang sangat berpotensi.

Oleh karena itu melalui Bimtek tersebut BSIP ingin memberikan informasi kepada para petani terkait tata cara berproduksi yang baik yang standar.

“Agar produksinya itu lebih bagus, bermutu dan bisa lebih efisien. Efisien itu bukan berarti harus mahal, tetapi pembiayaan itu tidak merugikan para petani,” pungkasnya. (Dya)